



Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Disparitas Akses Pendidikan Melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sekolah Dasar di Kota Tanjungpinang Tahun 2025

Aditya Rizal Ramadhan^{1*}, Novi Winarti², Khairi Rahmi³

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji

Corresponding Author e-mail:

Article History:

Received: 10-08-2026

Revised: 28-09-2026

Accepted: 28-09-2026

Keywords: *education access disparity; local government; SPMB; elementary school; Tanjungpinang*

Abstract: *Disparities in access to elementary education in Tanjungpinang City are reflected in the unequal distribution of students across schools, particularly between schools experiencing enrollment pressure and schools with relatively low student numbers, such as SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat. The shift in student admission policy to the New Student Admission System (SPMB) in 2025 requires local governments not only to ensure an orderly admission process but also to orient the policy toward equitable access to education. This study aims to analyze the strategy of the Tanjungpinang City Government in reducing disparities in access to elementary education through SPMB based on the dimensions of goals, plans, programs, decisions, and effects. This study employed a descriptive qualitative approach involving six purposively selected informants consisting of representatives from the Education Office, schools, and parents of students. Data were collected through semi-structured interviews and documentation and analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the local government has established equity-oriented goals, planned school capacity, conducted socialization and coordination, implemented SPMB, and issued technical guidelines as the basis for implementation. However, the distribution of students across schools remains uneven. This condition is influenced by population distribution, family mobility, and parents' preferences for particular schools. The study concludes that the effectiveness of the SPMB strategy depends not only on the admission mechanism but also on the integration of demographic data, school capacity, educational service quality, and public trust into student admission planning.*

How to Cite: Aditya Rizal Ramadhan, Novi Winarti, Khairi Rahmi. (2026). The title. *Ambidextrous Journal of Innovation Efficiency and Technology in Organization*. 5(3). Pp 388-403
<https://doi.org/10.61536/ambidextrous.v5i03.671>

 <https://doi.org/10.61536/ambidextrous.v5i03.671>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Introduction

Akses pendidikan dasar berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah menjamin setiap anak memperoleh layanan sekolah yang dapat dijangkau, tersedia, dan memiliki mutu yang layak. Ketimpangan akses muncul ketika jumlah sekolah, kapasitas ruang belajar, persebaran penduduk, kondisi keluarga, dan pilihan masyarakat tidak bergerak searah. Ananda (2025) menempatkan akses pendidikan dasar sebagai persoalan kebijakan yang tidak cukup diselesaikan melalui ketersediaan sekolah saja. Kualitas layanan, jarak, kemampuan keluarga, dan distribusi sumber daya turut menentukan peluang seorang anak memperoleh pendidikan. Ariska Putri (2024) juga menunjukkan bahwa disparitas pendidikan memiliki hubungan dengan ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan tersebut membuat pemerataan akses pendidikan memiliki konsekuensi yang melampaui urusan administrasi penerimaan murid.

Desentralisasi memberi pemerintah daerah ruang yang besar untuk menyesuaikan pelayanan pendidikan dengan karakter wilayah. Bida (2021) menjelaskan bahwa desentralisasi dapat memperkuat respons pemerintah terhadap kebutuhan lokal, tetapi perbedaan kapasitas antarwilayah juga dapat mempertahankan disparitas pendidikan. Zilfa (2016) menekankan pentingnya pengelolaan pendidikan dasar oleh pemerintah daerah karena kebutuhan sekolah sangat dipengaruhi kondisi sosial, geografis, dan demografis setempat. Mubin dan Dian (2023) menilai otonomi pendidikan perlu diikuti kemampuan pemerintah daerah mengelola mutu, sumber daya, dan pemerataan layanan. Kerangka tersebut relevan bagi Kota Tanjungpinang karena distribusi penduduk dan sekolah tidak seragam di setiap kecamatan.

Kebijakan penerimaan murid menjadi salah satu instrumen yang dipakai untuk mengatur akses. Sistem zonasi sebelumnya dirancang agar calon peserta didik lebih dekat dengan sekolah dan agar konsentrasi murid tidak hanya terjadi di sekolah yang dianggap unggul. Syakarofath et al. (2020) menunjukkan bahwa zonasi memunculkan dukungan sekaligus penolakan karena tujuan pemerataan berhadapan dengan preferensi keluarga terhadap sekolah tertentu. Risna dan Lisdahlia (2020) mengemukakan bahwa pemerataan melalui zonasi membutuhkan konsistensi implementasi, komunikasi, dan dukungan sumber daya. Minsih (2021) menemukan bahwa persepsi masyarakat juga menentukan respons terhadap kebijakan zonasi jenjang sekolah dasar. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa aturan jarak tidak otomatis menghapus pilihan sosial yang telah terbentuk di masyarakat.

Perubahan kebijakan tahun 2025 membawa istilah Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 menekankan penerimaan murid yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi (Aristawidya & Santoso Agus, 2025). Pemerintah Kota Tanjungpinang kemudian menerbitkan petunjuk teknis SPMB tahun ajaran 2025/2026 sebagai acuan jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama (Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, n.d.). Perubahan tersebut penting karena pemerintah daerah tidak hanya melaksanakan seleksi administrasi. Pemerintah juga perlu memastikan aturan



penerimaan selaras dengan kebutuhan demografi, kapasitas sekolah, serta tujuan pemerataan layanan pendidikan.

Kondisi Kota Tanjungpinang memperlihatkan tekanan layanan pendidikan yang berbeda antarwilayah. Data tahun 2025 menunjukkan Kecamatan Tanjungpinang Timur memiliki 27 SD negeri dengan 12.006 siswa, sedangkan Tanjungpinang Barat memiliki 13 SD negeri dengan 3.111 siswa. Bukit Bestari memiliki 18 SD negeri dengan 5.104 siswa dan Tanjungpinang Kota memiliki 13 SD negeri dengan 2.362 siswa. Perbedaan tersebut menunjukkan distribusi siswa yang belum seimbang. Ketimpangan semakin terlihat ketika sekolah di sebagian wilayah kekurangan murid, sedangkan wilayah lain menghadapi jumlah penduduk dan kebutuhan layanan pendidikan yang jauh lebih besar. Kurniawati (2022) mengingatkan bahwa persoalan pendidikan berkaitan erat dengan pemerataan sarana, kualitas layanan, dan dukungan tenaga pendidikan.

Kota Tanjungpinang juga pernah menghadapi penutupan sekolah dasar akibat jumlah murid yang sangat rendah. Kepri (2023) melaporkan penutupan SD Negeri 002 Tanjungpinang Barat dan SD Negeri 015 Bukit Bestari. Kasus tersebut menunjukkan risiko kebijakan ketika distribusi penduduk dan minat masyarakat tidak seimbang dengan lokasi serta kapasitas sekolah. Winarti (2023) menemukan bahwa kebijakan zonasi di Tanjungpinang belum berhasil menghasilkan pemerataan akses dan mutu secara penuh. Riset itu juga mencatat sekolah yang kelebihan siswa serta sekolah yang kehilangan murid. Temuan lokal tersebut memberi dasar kuat untuk menilai kebijakan penerimaan murid bukan hanya dari kepatuhan prosedural, melainkan dari strategi pemerintah dalam merespons ketimpangan nyata.

SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat menjadi contoh yang memperjelas persoalan tersebut. Data sekolah tahun 2025 mencatat 10 murid kelas I dengan jumlah keseluruhan 109 siswa dari kelas I sampai kelas VI. Keterangan pihak sekolah juga menunjukkan bahwa penerimaan pada tahun ajaran sebelumnya hanya sekitar tujuh murid baru, ketika jumlah seluruh siswa berada di kisaran 115 orang. Perbedaan angka tersebut berasal dari waktu pencatatan yang berbeda, tetapi keduanya mengarah pada persoalan yang sama, yaitu rendahnya penerimaan murid baru. Situasi ini berkaitan dengan kondisi demografis wilayah. Tanjungpinang Barat tercatat memiliki 41.660 penduduk, jauh lebih sedikit dibandingkan Tanjungpinang Timur yang mencapai 127.750 jiwa.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menjelaskan berbagai persoalan penerimaan murid, tetapi belum seluruhnya menjawab kebutuhan kajian ini. Darya (2020) mengevaluasi implementasi PPDB Kota Balikpapan melalui survei yang mencakup 26 SD dan 23 SMP. Kajian tersebut menyoroti sistem daring, sosialisasi, jaringan, dan waktu pendaftaran. Fokus ini penting untuk menilai aspek operasional, namun strategi pemerintah daerah belum dianalisis sebagai rangkaian yang menghubungkan tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak. Sabrina dan Ishak (2020) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi zonasi jenjang SMA di Pekanbaru. Perbedaan jenjang pendidikan dan struktur kewenangan membuat temuannya belum cukup untuk menjelaskan persoalan sekolah dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota.

Kajian Minsih (2021) di Kecamatan Serengan, Surakarta, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi untuk membahas implementasi, persepsi masyarakat, serta dampak zonasi jenjang SD. Kajian tersebut kuat

dalam menggambarkan sudut pandang masyarakat, tetapi strategi pemerintah daerah belum ditempatkan sebagai fokus utama. Harianti dan Sukma (2024) meneliti SMAN 1 dan 2 Kota Blitar melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan kerangka implementasi Van Meter dan Van Horn. Hasilnya menunjukkan pengaruh standar, sumber daya, komunikasi, karakter agen, dan lingkungan kebijakan. Fokus pada sekolah menengah atas membuat karakter kewenangan dan penerimaan murid berbeda dari jenjang sekolah dasar di tingkat kota.

Kajian Winarti (2023) memberi pijakan yang dekat karena mengambil lokasi di Kota Tanjungpinang. Penelitian deskriptif kualitatif tersebut menggunakan teori evaluasi William Dunn untuk menilai dampak zonasi PPDB dan menemukan bahwa pemerataan akses belum tercapai serta dampaknya berbeda antarwilayah. Kajian itu masih berada dalam kerangka PPDB zonasi sebelum perubahan menjadi SPMB tahun 2025 dan lebih berfokus pada evaluasi dampak. Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor strategis dan menelusuri proses sejak penetapan tujuan sampai dampak kebijakan. Kerangka Charles O. Jones digunakan untuk melihat hubungan antara tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak sebagai satu rangkaian strategi pemerintah daerah (Jones, 1996).

Pembahasan mengenai disparitas pendidikan juga telah berkembang dalam cakupan yang lebih luas. Aulia Rahmi et al. (2025) menyoroti dampak kebijakan zonasi terhadap ketimpangan akses pendidikan dasar di era digital, sedangkan Ananda (2025) membahas permasalahan akses pendidikan dasar dari sisi kebijakan. Kedua kajian tersebut memperkuat pemahaman tentang ketimpangan, tetapi belum menjelaskan bagaimana pemerintah kota menyesuaikan kebijakan penerimaan murid dengan persebaran penduduk dan kondisi sekolah yang berbeda. Kajian berbasis kasus di Tanjungpinang diperlukan untuk mempertemukan desain kebijakan dengan pengalaman pelaksana, kondisi demografis, dan pilihan masyarakat.

Kerangka kebijakan publik membantu menempatkan persoalan tersebut. Dunn (1998) menjelaskan analisis kebijakan sebagai proses yang menghubungkan perumusan masalah, pilihan tindakan, implementasi, dan evaluasi. Cudai dan Guntur (2019) menegaskan bahwa kebijakan publik perlu dinilai melalui tujuan, aktor, sumber daya, pelaksanaan, serta konsekuensi yang dihasilkan. Jones (1996) memberi perangkat yang lebih operasional untuk penelitian ini melalui lima unsur strategi, yakni goal, plan, program, decision, dan effect. Unsur itu memungkinkan analisis bergerak dari apa yang ingin dicapai pemerintah, apa yang direncanakan, tindakan yang dijalankan, keputusan yang ditetapkan, hingga perubahan yang muncul setelah kebijakan dilaksanakan.

Mengacu pada permasalahan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji strategi Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam mereduksi kesenjangan akses pendidikan melalui jalur Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang sekolah dasar tahun 2025, melalui penelaahan tujuan, rencana, program, keputusan, serta dampaknya. Kajian ini memberi kontribusi akademik bagi pembahasan kebijakan pendidikan lokal dengan menghubungkan strategi penerimaan murid dan kondisi demografis. Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan agar penetapan daya tampung, sosialisasi, koordinasi sekolah, dan keputusan penerimaan murid tidak berhenti pada keteraturan administrasi, tetapi juga mempertimbangkan distribusi penduduk, kepercayaan masyarakat, dan penguatan mutu sekolah yang kekurangan murid.

Research Methods

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena tujuan kajian berfokus pada pemahaman strategi pemerintah daerah, proses pelaksanaan kebijakan, serta alasan yang menjelaskan perbedaan hasil antarwilayah. Ruhansih (2017) menjelaskan bahwa desain deskriptif kualitatif membantu peneliti menggambarkan fenomena berdasarkan kondisi lapangan dan hubungan antarunsur yang muncul dalam data. Waruwu (2024) menempatkan pendekatan kualitatif sebagai pilihan yang tepat ketika peneliti membutuhkan penjelasan mendalam mengenai pengalaman, proses, dan makna yang terbentuk dalam lingkungan sosial. Pendekatan ini sesuai karena strategi SPMB tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka penerimaan murid.

Lokasi penelitian berada di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dengan fokus kasus SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat dan keterlibatan Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. Pemilihan sekolah didasarkan pada rendahnya penerimaan murid baru serta jumlah siswa yang lebih kecil dibandingkan kapasitas sekolah. Kasus tersebut dipakai untuk melihat hubungan antara keputusan pemerintah, kondisi demografi, preferensi masyarakat, dan keberlangsungan layanan sekolah. Unit analisis penelitian ialah strategi Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam mengatasi disparitas akses pendidikan melalui SPMB jenjang sekolah dasar tahun 2025.

Informan dipilih secara purposif. Teknik ini memungkinkan peneliti memilih pihak yang mempunyai pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian. Akin et al. (2026) menjelaskan bahwa pemilihan informan kualitatif perlu mempertimbangkan relevansi pengalaman dan kemampuan memberikan informasi yang mendalam. Enam informan terlibat dalam penelitian, terdiri atas Kepala Seksi Peserta Didik SD Dinas Pendidikan, pengurus SPMB SD di Dinas Pendidikan, kepala SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat, guru sekaligus staf tata usaha sekolah, serta dua orang tua peserta didik. Komposisi tersebut memberi sudut pandang pemerintah, pelaksana sekolah, dan penerima layanan.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur. Wawancara diarahkan kepada penetapan tujuan pemerataan, proses penyusunan daya tampung, bentuk sosialisasi, koordinasi Dinas Pendidikan dengan sekolah, pelaksanaan program SPMB, keputusan teknis, serta dampak yang dirasakan sekolah dan orang tua. Hansen (2020) menjelaskan bahwa wawancara kualitatif memberi ruang bagi peneliti menggali alasan, pengalaman, dan konteks yang tidak selalu terlihat melalui dokumen. Pertanyaan tetap mengacu kepada fokus penelitian, namun informan diberi ruang menjelaskan pengalaman secara rinci sehingga data tidak terikat jawaban singkat.

Data sekunder berasal dari dokumen kebijakan SPMB, petunjuk teknis Dinas Pendidikan, data jumlah peserta didik, data kependudukan, dan dokumen sekolah. Nilamsari (2014) menjelaskan bahwa studi dokumen berguna untuk melengkapi data wawancara dan menelusuri bukti administratif yang berkaitan dengan peristiwa penelitian. Dokumen digunakan untuk memeriksa kesesuaian antara keterangan informan dan data tertulis. Sumber ini juga membantu melihat perbedaan antara kapasitas formal sekolah, jumlah penduduk, dan jumlah murid yang benar-benar terdaftar.

Analisis data mengikuti alur reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

sebagaimana dikembangkan Miles et al. (2014). Reduksi dilakukan dengan memilih informasi yang berkaitan langsung dengan lima unsur strategi Charles O. Jones. Data kemudian dikelompokkan ke dalam tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak. Hasil pengelompokan disajikan dalam uraian tematik dan tabel yang relevan. Tahap akhir menghubungkan keterangan antar informan, dokumen kebijakan, data sekolah, dan data kependudukan untuk memperoleh kesimpulan yang konsisten. Sinaga (2025) menekankan bahwa analisis kualitatif memerlukan pengorganisasian data yang sistematis agar hubungan antartema dapat dijelaskan secara logis.

Keabsahan data dijaga melalui perbandingan sumber. Keterangan Dinas Pendidikan dibandingkan dengan informasi kepala sekolah, guru, dan orang tua. Data wawancara juga dicocokkan dengan dokumen sekolah serta data kependudukan. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Patton (1987) bahwa penggunaan sumber yang beragam membantu memperkuat ketepatan pemahaman terhadap fenomena. Penelitian tidak menggunakan generalisasi statistik. Hasil diarahkan untuk menjelaskan strategi dan kondisi yang ditemukan dalam konteks Kota Tanjungpinang, khususnya kasus SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat.

Result and Discussion

Gambaran disparitas akses pendidikan di SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat

Disparitas akses pendidikan terlihat dari ketidakseimbangan jumlah murid antarwilayah dan rendahnya penerimaan murid di SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat. Sekolah masih memiliki ruang belajar, tenaga pendidik, dan kapasitas layanan yang dapat dimanfaatkan, tetapi jumlah pendaftar belum memenuhi daya tampung. Keadaan ini membuat pemanfaatan sumber daya sekolah kurang optimal dan menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas saja belum cukup untuk menghasilkan distribusi murid yang seimbang.

Data sekolah memperlihatkan komposisi peserta didik menurut rombongan belajar, jenis kelamin, dan jumlah siswa. Rincian tersebut disajikan dalam Tabel 4.2 untuk memperlihatkan kondisi keterisian peserta didik di setiap kelas.

Tabel 1. Jumlah Peserta Didik SD Negeri 001 Kota Tanjungpinang Barat

NO	Nama Rambel	L	P	Jumlah
1	Kelas 1	9	1	10
2	Kelas 2	7	11	18
3	Kelas 3	7	13	20
4	Kelas 4	11	10	21
5	Kelas 5	11	5	16
6	Kelas 6	14	10	24

Sumber: Data Sekolah Kota Tanjungpinang Barat Tahun 2025

Tabel 1 menunjukkan jumlah siswa yang tercatat sebanyak 109 orang. Kelas I memiliki jumlah paling rendah, yaitu 10 murid, sedangkan kelas VI memiliki 24 murid. Selisih antarkelas memperkuat temuan mengenai menurunnya penerimaan murid baru. Informan sekolah menjelaskan bahwa rendahnya jumlah calon murid berkaitan dengan berkurangnya keluarga

muda di sekitar sekolah, mobilitas orang tua yang bekerja di luar kota, serta pilihan keluarga terhadap sekolah lain yang dianggap lebih menarik.

Ketimpangan wilayah dan persebaran penduduk

Perbedaan jumlah penduduk menjadi bagian penting dalam menjelaskan ketimpangan murid. Wilayah dengan penduduk lebih besar memiliki basis calon peserta didik yang lebih luas, sedangkan wilayah berpenduduk lebih kecil menghadapi jumlah anak usia sekolah yang lebih terbatas. Data kependudukan tahun 2025 pada Tabel 2 memperlihatkan perbedaan tersebut antar kecamatan di Kota Tanjungpinang.

Tabel 2 Data Jumlah Penduduk Kecamatan di Kota Tanjungpinang Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Bukit Bestari	51.350 Jiwa
2.	Tanjungpinang Timur	127.750 Jiwa
3.	Tanjungpinang Kota	19.200 Jiwa
4.	Tanjungpinang Barat	41.660 Jiwa
Jumlah	Kota Tanjungpinang	239.960 Jiwa

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025

Tabel 2 menunjukkan Tanjungpinang Timur memiliki 127.750 jiwa, sedangkan Tanjungpinang Barat memiliki 41.660 jiwa. Selisih 86.090 jiwa memberi gambaran kuat mengenai perbedaan basis penduduk antarwilayah. Distribusi tersebut membantu menjelaskan mengapa kebijakan daya tampung yang hanya bertumpu pada kapasitas ruang kelas belum cukup untuk menghasilkan pemerataan jumlah murid. Perencanaan perlu menautkan kapasitas sekolah dengan jumlah keluarga dan anak usia sekolah yang benar-benar berada di wilayah layanan.

Tujuan strategi pemerintah daerah

Dinas Pendidikan menetapkan pemerataan akses sebagai tujuan utama SPMB. Informan pemerintah menjelaskan bahwa setiap anak diharapkan memperoleh kesempatan pendidikan tanpa dibedakan oleh kondisi ekonomi maupun lokasi tempat tinggal. Tujuan lain ialah menyeimbangkan jumlah murid agar layanan sekolah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif. Pihak sekolah memahami arah tujuan tersebut dan melaksanakan penerimaan murid sesuai petunjuk teknis.

Kesamaan pemahaman mengenai tujuan pemerataan belum berbanding lurus dengan distribusi murid. Pemerintah dan sekolah memiliki arah yang sama, tetapi SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat masih mengalami kekurangan pendaftar. Kondisi demografis dan preferensi keluarga membatasi kemampuan SPMB untuk menyeimbangkan jumlah murid jika kebijakan hanya bertumpu pada mekanisme penerimaan.

Rencana daya tampung, sosialisasi, dan koordinasi

Perencanaan daya tampung dilakukan melalui data ruang kelas, ketersediaan guru, sarana, jumlah calon peserta didik, dan kondisi sekolah. Dinas Pendidikan meminta sekolah

menyampaikan kapasitas sebelum penerimaan dimulai. Mekanisme tersebut membuat jumlah maksimal murid tidak ditetapkan secara seragam. Sekolah yang menjadi lokasi penelitian membenarkan adanya koordinasi terkait rombongan belajar dan daya tampung.

Perencanaan juga mencakup sosialisasi melalui sekolah, media sosial, pengumuman resmi, dan grup komunikasi orang tua. Informan orang tua menilai informasi jadwal, syarat, dan tahapan pendaftaran lebih mudah diperoleh. Aspek komunikasi berjalan relatif baik dan mengurangi kebingungan administratif. Koordinasi antara Dinas Pendidikan dan sekolah juga dilaksanakan melalui rapat serta pendampingan saat kendala muncul.

Rencana yang tersusun dengan baik belum sepenuhnya menghasilkan distribusi murid yang seimbang. Daya tampung sekolah telah disesuaikan dengan kapasitas internal, tetapi jumlah calon murid di sekitar SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat tetap rendah. Sosialisasi membuat masyarakat lebih memahami prosedur SPMB, sementara keputusan memilih sekolah tetap dipengaruhi reputasi, mutu pembelajaran, lingkungan sekolah, dan rekomendasi dari keluarga maupun lingkungan sosial.

Program pelaksanaan SPMB dan komunikasi masyarakat

Program pemerintah meliputi pelaksanaan SPMB, sosialisasi, serta kerja sama dengan sekolah. Pelaksanaan mengikuti petunjuk teknis yang mengatur jadwal, persyaratan, jalur penerimaan, daya tampung, dan proses seleksi. Informan sekolah menyatakan tahapan administratif dapat dijalankan sesuai arahan Dinas Pendidikan. Program ini memberi kepastian prosedur dan membuat proses penerimaan lebih tertib.

Program sosialisasi memperluas akses masyarakat terhadap informasi. Orang tua memperoleh penjelasan melalui sekolah, media sosial, dan grup WhatsApp sehingga jadwal, persyaratan, dan tahapan pendaftaran lebih mudah dipahami. Keberhasilan komunikasi ini membantu kelancaran proses SPMB, tetapi belum otomatis menghasilkan pemerataan. Pilihan orang tua tetap dipengaruhi penilaian terhadap kualitas dan reputasi sekolah. Kerja sama antara Dinas Pendidikan dan sekolah juga membuat prosedur lebih seragam, meski belum dapat mengatasi faktor demografis dan sosial yang menentukan jumlah calon murid.

Keputusan pelaksanaan dan penetapan daya tampung

Keputusan pemerintah daerah diwujudkan melalui petunjuk teknis SPMB dan penetapan daya tampung masing-masing sekolah. Keputusan tersebut memberi dasar yang sama bagi sekolah untuk menerima murid secara tertib, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif. Dinas Pendidikan menilai penetapan kapasitas penting untuk mencegah penumpukan siswa di satu sekolah dan kekurangan siswa di sekolah lain.

Kasus SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat menunjukkan keterbatasan keputusan berbasis kapasitas. Sekolah menerima ketetapan daya tampung sesuai kondisi ruang kelas dan tenaga pendidik, tetapi pendaftar tetap berada di bawah kapasitas. Keputusan administratif belum mampu menyeimbangkan distribusi karena jumlah calon murid, perpindahan keluarga, dan pilihan sekolah tidak sepenuhnya berada dalam kendali mekanisme SPMB.

Dampak strategi terhadap pemerataan dan layanan

Strategi pemerintah menghasilkan dampak positif dalam keteraturan penerimaan dan kemudahan akses informasi. Sekolah mempunyai acuan yang sama, masyarakat mengetahui jadwal serta persyaratan, dan koordinasi dapat dilakukan ketika muncul kendala. Dampak ini penting bagi tata kelola layanan karena mengurangi ketidakpastian prosedur.

Dampak terhadap pemerataan jumlah murid masih terbatas. SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat tetap menghadapi penerimaan murid yang rendah, sedangkan beberapa sekolah lain masih menjadi pilihan utama masyarakat. Keterangan orang tua menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran, lingkungan sekolah, rekomendasi keluarga, dan reputasi sekolah tetap menjadi pertimbangan penting. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi SPMB membantu proses pendaftaran, tetapi belum cukup untuk mengubah pilihan keluarga.

Faktor sosial dan demografis memperkuat kondisi tersebut. Sebagian anak tinggal bersama anggota keluarga karena orang tua bekerja di luar kota, sementara sebagian keluarga muda memilih tinggal di wilayah lain. Perubahan komposisi penduduk mengurangi basis calon murid di sekitar sekolah. Strategi SPMB mampu mengatur proses penerimaan, tetapi belum mampu mengubah distribusi penduduk atau menghapus perbedaan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.

Discussion

SPMB sebagai strategi pemerataan akses

Pemerintah daerah telah menjalankan lima unsur strategi Charles O. Jones, meski hasil setiap unsur belum sama kuatnya. Tujuan pemerataan sudah dirumuskan, rencana telah disusun, program berjalan, keputusan diterbitkan, dan dampak administratif mulai terlihat. Jones (1996) menjelaskan strategi sebagai rangkaian yang menghubungkan tujuan dengan konsekuensi kebijakan. Hubungan ini penting karena keberhasilan tidak cukup dinilai dari terlaksananya program. Hasil akhir perlu ditelaah secara berkelanjutan guna menilai kemampuan kebijakan dalam mewujudkan tujuan pemerataan. Kejadian di Tanjungpinang menunjukkan bahwa penerapan yang lebih tertib tidak otomatis mengarah pada terwujudnya distribusi murid yang seimbang.

Temuan ini sejalan dengan Dunn (1998) yang menekankan bahwa kebijakan perlu dinilai melalui hasil dan konsekuensinya, bukan hanya kepatuhan implementasi. Cudai dan Guntur (2019) juga menjelaskan bahwa analisis kebijakan memerlukan hubungan antara tujuan, tindakan pemerintah, aktor pelaksana, dan dampak. SPMB memberi pemerintah instrumen untuk mengatur siapa yang dapat diterima dan melalui mekanisme apa, tetapi instrumen itu tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengubah distribusi penduduk. Karena itu, strategi pemerataan perlu diperluas ke perencanaan layanan pendidikan yang menghubungkan penerimaan murid, pemetaan demografi, mutu sekolah, dan proyeksi kebutuhan ruang belajar.

Temuan ini menguatkan riset Winarti (2023) yang menunjukkan bahwa pemerataan akses di Tanjungpinang belum tercapai dan dampak zonasi tersebar tidak merata. Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Winarti menilai dampak kebijakan zonasi melalui kerangka evaluasi, sedangkan penelitian ini menelusuri strategi pemerintah setelah perubahan menjadi SPMB tahun 2025. Analisis menunjukkan bahwa hambatan pemerataan sudah terlihat sejak perencanaan daya tampung. Kapasitas sekolah telah dihitung, tetapi jumlah calon murid dan

perubahan demografi belum menjadi dasar utama dalam menyeimbangkan distribusi peserta didik.

Analisis Kesesuaian Daya Tampung Sekolah dengan Karakteristik Demografi Wilayah

Perbedaan 127.750 jiwa di Tanjungpinang Timur dan 41.660 jiwa di Tanjungpinang Barat memperlihatkan bahwa kebutuhan layanan pendidikan tidak dapat diperlakukan seragam. Penetapan daya tampung yang hanya mempertimbangkan ruang kelas, guru, dan sarana sekolah menghasilkan angka kapasitas administratif, tetapi belum tentu sesuai jumlah calon murid yang tersedia. Nila Rahmi (2022) menekankan pentingnya perencanaan strategis untuk menyesuaikan sumber daya sekolah dengan kebutuhan pendidikan. Dalam kasus Tanjungpinang, data kependudukan perlu bergerak bersama data anak usia sekolah, pertumbuhan permukiman, perpindahan keluarga, dan tren pendaftaran beberapa tahun.

Bida (2021) menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan membuka ruang bagi kebijakan lokal yang lebih sesuai kebutuhan daerah. Ruang tersebut belum memberi manfaat maksimal bila perencanaan masih memakai ukuran yang terlalu umum. Pemerintah kota memiliki posisi yang dekat dengan data sekolah dan perubahan permukiman. Kapasitas ini seharusnya memungkinkan proyeksi mikro wilayah layanan. Zilfa (2016) juga menempatkan pengelolaan pendidikan dasar sebagai fungsi daerah yang menuntut penyesuaian terhadap kondisi lokal. Penggunaan data demografis yang lebih rinci akan membantu pemerintah membedakan sekolah yang membutuhkan tambahan kapasitas dari sekolah yang membutuhkan strategi peningkatan daya tarik.

Pengalaman di Tanjungpinang juga berkaitan dengan temuan Darya (2020) di Balikpapan. Darya menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB membutuhkan sosialisasi, kesiapan sistem, dan pengelolaan kapasitas. Kesamaannya terlihat pada pentingnya tata kelola penerimaan yang jelas. Perbedaannya, persoalan di Tanjungpinang tetap muncul meski kendala utama bukan jaringan atau mekanisme pendaftaran. Tekanan yang lebih besar berasal dari ketidakseimbangan antara lokasi penduduk dan kapasitas sekolah. Temuan ini memperluas pembahasan PPDB atau SPMB dari persoalan teknis menuju perencanaan pelayanan pendidikan.

Penutupan sekolah yang pernah terjadi di Tanjungpinang memperkuat urgensi perencanaan demografi. Kepri (2023) mencatat dua SD negeri ditutup setelah jumlah murid sangat rendah. Keputusan seperti penutupan sekolah mempunyai konsekuensi aset, akses jangka panjang, dan kemampuan pemerintah merespons perubahan penduduk di masa depan. Pemerintah perlu menghindari respons yang hanya muncul setelah jumlah siswa turun tajam. Sistem peringatan berbasis tren kelahiran, domisili anak usia sekolah, perkembangan perumahan, dan jumlah pendaftar dapat memberi waktu untuk intervensi sebelum sekolah kehilangan basis murid.

Dinamika Komunikasi Kebijakan dan Preferensi Keluarga dalam Pemilihan Sekolah

Hasil wawancara menunjukkan sosialisasi melalui sekolah, media sosial, dan grup WhatsApp membantu orang tua memahami syarat serta tahapan SPMB. Temuan ini mendukung Risna dan Lisdahlia (2020) yang menempatkan komunikasi sebagai unsur penting

dalam pemerataan pendidikan melalui kebijakan zonasi. Harianti dan Sukma (2024) juga menemukan komunikasi antarorganisasi memengaruhi kejelasan tujuan dan pelaksanaan kebijakan. Tanjungpinang menunjukkan manfaat yang sama. Koordinasi Dinas Pendidikan dengan sekolah mengurangi variasi prosedur dan memberi saluran penyelesaian ketika kendala administratif muncul.

Kejelasan prosedur belum cukup untuk mengubah preferensi masyarakat terhadap sekolah. Minsih (2021) menemukan bahwa persepsi masyarakat ikut membentuk dampak zonasi di jenjang SD. Kondisi serupa terlihat di Tanjungpinang. Orang tua tidak hanya mencari informasi tentang cara mendaftar, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman belajar, reputasi guru, lingkungan sekolah, rekomendasi keluarga, dan citra sekolah. Informasi SPMB menjawab kebutuhan administratif, sedangkan keyakinan terhadap kualitas sekolah terbentuk dari pengalaman dan informasi sosial yang lebih luas.

Syakarofath et al. (2020) menjelaskan pro dan kontra zonasi lahir dari pertemuan antara tujuan pemerataan dan kepentingan keluarga memilih sekolah yang dianggap terbaik. Ketegangan serupa masih terlihat setelah istilah kebijakan berubah menjadi SPMB. Pemerintah dapat menentukan jalur penerimaan, tetapi tidak mudah menghapus pengetahuan sosial yang beredar mengenai sekolah favorit. Karena itu, komunikasi perlu berkembang dari sosialisasi jadwal menuju komunikasi mutu. Sekolah yang kurang diminati perlu menampilkan kinerja, program pembelajaran, kegiatan siswa, layanan guru, dan lingkungan sekolah secara terbuka agar masyarakat mempunyai dasar penilaian yang lebih seimbang.

Handyka (2023) menekankan partisipasi sosial sebagai bagian penting dalam transformasi pendidikan. Gagasan tersebut relevan karena kepercayaan terhadap sekolah tidak dapat dibentuk hanya melalui surat edaran. Pemerintah dan sekolah perlu melibatkan orang tua, komite sekolah, serta masyarakat sekitar dalam komunikasi layanan. Forum warga, kunjungan sekolah, publikasi capaian, dan ruang konsultasi SPMB dapat membangun hubungan yang lebih dekat. Upaya ini bukan promosi semata. Tujuannya mengurangi kesenjangan informasi yang membuat reputasi lama terus menentukan pilihan keluarga.

Disparitas Mutu Sekolah sebagai Tantangan dalam Mewujudkan Pemerataan melalui SPMB

Preferensi orang tua menunjukkan bahwa pemerataan akses terkait erat dengan pemerataan mutu. Kurniawati (2022) menjelaskan bahwa rendahnya kualitas pendidikan dipengaruhi perbedaan sarana, tenaga pendidik, dan pengelolaan. Aulia Rahmi et al. (2025) juga menyoroti ketimpangan akses pendidikan dasar yang tetap bertahan ketika kualitas layanan antar sekolah tidak seimbang. Bila masyarakat menilai kualitas sekolah berbeda jauh, kebijakan penerimaan berbasis wilayah akan berhadapan dengan upaya keluarga mencari sekolah yang dinilai lebih baik.

Harianti dan Sukma (2024) menunjukkan bahwa perbedaan sumber daya antar sekolah di Blitar dapat menghambat tujuan pemerataan. Kondisi Tanjungpinang memperlihatkan gejala serupa meski jenjang pendidikan yang dikaji berbeda. SPMB dapat mengatur aliran murid, tetapi daya tarik sekolah tetap dibentuk oleh mutu layanan yang dirasakan masyarakat. Strategi pemerintah perlu menghubungkan kebijakan penerimaan dengan pemerataan guru, fasilitas,

kepemimpinan sekolah, dan program pembelajaran yang relevan. Tanpa penguatan mutu, sekolah dengan jumlah murid rendah berisiko terus kehilangan kepercayaan masyarakat.

Ariska Putri (2024) menghubungkan disparitas pendidikan dengan ketimpangan ekonomi. Hubungan tersebut memberi alasan agar pemerataan mutu tidak dipandang sebagai tambahan kebijakan. Keluarga dengan sumber daya lebih besar mempunyai pilihan yang lebih luas untuk mencari sekolah alternatif, termasuk sekolah yang lebih jauh atau swasta. Keluarga dengan pilihan terbatas lebih bergantung kepada layanan terdekat. Ketika kualitas antar sekolah berbeda, ketimpangan pilihan dapat memperbesar ketidaksetaraan. Pemerintah kota perlu memastikan sekolah yang kurang diminati tetap menawarkan pengalaman pendidikan yang dipercaya masyarakat.

Mubin dan Dian (2023) menegaskan bahwa otonomi pendidikan perlu digunakan untuk meningkatkan mutu, bukan sekadar memindahkan kewenangan administratif. Temuan di Tanjungpinang mendukung pandangan tersebut. Kewenangan lokal atas SPMB akan lebih bermakna jika terhubung dengan kebijakan peningkatan mutu sekolah. Data pendaftaran dapat digunakan sebagai tanda awal untuk mengenali sekolah yang terus kehilangan peminat. Penurunan pendaftar selama beberapa tahun dapat menjadi dasar bagi audit layanan, dialog dengan masyarakat, dan penyusunan rencana perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Keseimbangan Fleksibilitas Kebijakan dan Prinsip Keadilan dalam Implementasi SPMB

Petunjuk teknis SPMB memberi kepastian bagi sekolah dan masyarakat. Kejelasan aturan penting untuk menjaga objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan nondiskriminasi sebagaimana arah kebijakan tahun 2025 (Aristawidya & Santoso Agus, 2025). Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang (n.d.) menjadi dasar operasional yang membuat sekolah mempunyai acuan seragam. Kekuatan ini perlu dipertahankan karena fleksibilitas kebijakan tidak boleh berubah menjadi keputusan yang tidak transparan.

Kebutuhan fleksibilitas muncul ketika kondisi sekolah sangat berbeda. Sekolah dengan pendaftar jauh di bawah daya tampung membutuhkan respons yang berbeda dari sekolah dengan tekanan pendaftar tinggi. Kusumanegara (2010) menjelaskan bahwa kebijakan melibatkan banyak aktor dan kepentingan, sehingga desain implementasi perlu mempertimbangkan konteks serta kapasitas pelaksana. Indiahono (2009) juga menekankan dinamika kebijakan yang menuntut penyesuaian ketika lingkungan berubah. Bagi Tanjungpinang, penyesuaian dapat berupa evaluasi wilayah penerimaan, penguatan jalur yang relevan, layanan informasi lintas sekolah, atau redistribusi dukungan mutu.

Fleksibilitas tetap memerlukan data dan kriteria yang dapat diperiksa. Pemerintah tidak perlu mengubah aturan hanya karena satu sekolah kekurangan murid. Evaluasi harus melihat tren beberapa tahun, perubahan jumlah anak usia sekolah, jarak antarsekolah, kapasitas ruang belajar, serta dampak terhadap sekolah lain. Pendekatan ini menjaga keputusan tetap rasional dan mengurangi risiko memindahkan masalah dari satu wilayah ke wilayah lain. Dunn (1998) menempatkan peramalan konsekuensi sebagai bagian penting analisis kebijakan, sehingga keputusan sebaiknya menguji kemungkinan dampak sebelum diterapkan.

Implikasi Tata Kelola Pendidikan Lokal dalam Mengatasi Disparitas Akses Sekolah

Hasil kajian memperlihatkan bahwa disparitas akses pendidikan dasar di Tanjungpinang terbentuk dari hubungan antara kebijakan penerimaan, kondisi demografis, mobilitas keluarga, dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah. Fokus ini memperluas pembahasan yang sebelumnya banyak menilai implementasi atau dampak zonasi. Sabrina dan Ishak (2020) membahas evaluasi zonasi jenjang SMA di Pekanbaru melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Darya (2020) menilai implementasi PPDB Balikpapan melalui survei lintas sekolah, sedangkan Minsih (2021) menonjolkan persepsi masyarakat di Surakarta. Kajian Tanjungpinang menempatkan rangkaian keputusan pemerintah kota sebagai pusat analisis dan menghubungkannya dengan kondisi sekolah yang kehilangan basis murid.

Perbedaan antara keberhasilan administratif dan keberhasilan pemerataan menjadi bagian penting dari hasil penelitian. SPMB Tanjungpinang telah memberi aturan yang jelas, informasi yang lebih mudah diakses, serta koordinasi yang berjalan. Capaian tersebut belum cukup untuk menunjukkan bahwa disparitas telah berkurang. Pemerataan perlu dinilai melalui kesesuaian jumlah anak usia sekolah, daya tampung, keterisian rombongan belajar, jarak layanan, serta mutu sekolah. Ukuran yang lebih lengkap akan membuat evaluasi kebijakan lebih dekat dengan kondisi sekolah dan kebutuhan masyarakat.

Ananda (2025) menyatakan bahwa persoalan akses pendidikan dasar membutuhkan kebijakan yang memadukan keterjangkauan dan kualitas. Temuan Tanjungpinang mengarah pada kebutuhan yang sama. SPMB dapat menjadi pintu masuk pemerataan, tetapi mekanisme penerimaan perlu didukung integrasi data kependudukan dan data sekolah, penguatan sekolah yang kurang diminati, komunikasi mutu kepada masyarakat, serta evaluasi tahunan terhadap perubahan distribusi murid. Langkah tersebut membantu pemerintah merespons penurunan jumlah murid lebih awal sebelum persoalan berkembang menjadi kekurangan siswa yang berkepanjangan.

Implikasi tata kelola juga cukup jelas. Dinas Pendidikan perlu menggunakan rapat koordinasi bukan hanya untuk menyampaikan jadwal dan prosedur, tetapi juga untuk membahas data keterisian sekolah dan perubahan demografi. Sekolah perlu memiliki ruang untuk menyampaikan penyebab rendahnya pendaftar berdasarkan pengalaman lokal. Orang tua perlu dilibatkan untuk memahami alasan pemilihan sekolah. Data dari tiga sumber tersebut dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat dibandingkan ketetapan daya tampung yang hanya berangkat dari kapasitas fisik.

Conclusion and Recommendation

Strategi Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang dalam mengatasi disparitas akses pendidikan melalui SPMB sekolah dasar telah dilaksanakan melalui penetapan tujuan pemerataan akses, perencanaan daya tampung, sosialisasi, koordinasi dengan sekolah, pelaksanaan program penerimaan murid baru, penyusunan petunjuk teknis, serta penetapan kapasitas sekolah. Berbagai langkah tersebut telah membantu menciptakan proses penerimaan murid yang lebih tertib dan memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait SPMB. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu menciptakan distribusi murid yang seimbang antar sekolah. Kondisi SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat memperlihatkan bahwa rendahnya jumlah pendaftar tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penerimaan murid, tetapi juga dipengaruhi oleh persebaran penduduk, mobilitas keluarga, dan kecenderungan orang tua

memilih sekolah tertentu. Perbedaan jumlah penduduk antara Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Kecamatan Tanjungpinang Barat semakin menunjukkan bahwa upaya pemerataan akses pendidikan membutuhkan strategi yang menyesuaikan kebijakan penerimaan murid dengan kondisi demografis setiap wilayah.

Meskipun penelitian ini mampu memberikan gambaran yang cukup mendalam mengenai pelaksanaan SPMB dan persoalan disparitas akses pendidikan, cakupan penelitian masih terbatas pada enam informan dengan perhatian utama terhadap kondisi SD Negeri 001 Tanjungpinang Barat. Cakupan tersebut belum menggambarkan seluruh karakteristik dan permasalahan sekolah dasar yang tersebar di Kota Tanjungpinang. Data demografi yang digunakan juga masih berupa jumlah penduduk berdasarkan kecamatan sehingga belum menunjukkan jumlah anak usia sekolah secara lebih terperinci berdasarkan kelurahan maupun wilayah layanan sekolah. Kondisi tersebut membuat hubungan antara jumlah calon murid, kebutuhan layanan pendidikan, dan daya tampung setiap sekolah belum dapat dianalisis secara lebih rinci.

Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyesuaian strategi pemerintah daerah agar penetapan daya tampung sekolah tidak hanya mengacu pada kapasitas ruang kelas dan sarana yang tersedia. Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang perlu mempertimbangkan jumlah anak usia sekolah, perkembangan kawasan permukiman, kecenderungan jumlah pendaftar setiap tahun, jarak antarsekolah, serta tingkat keterisian rombongan belajar. Sekolah yang mengalami kekurangan murid juga memerlukan dukungan untuk meningkatkan mutu layanan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah. Sosialisasi SPMB dapat diperluas dari penyampaian jadwal dan prosedur pendaftaran menjadi sarana untuk mengenalkan kualitas layanan, program sekolah, tenaga pendidik, dan fasilitas yang dimiliki setiap sekolah. Evaluasi pelaksanaan SPMB juga perlu menilai perubahan jumlah dan persebaran murid antar sekolah agar keberhasilan kebijakan tidak hanya dilihat dari kelancaran proses pendaftaran.

Pengembangan penelitian berikutnya dapat mencakup lebih banyak sekolah dasar negeri di Kota Tanjungpinang agar variasi kondisi antarwilayah dapat terlihat dengan lebih jelas. Data mengenai persebaran penduduk usia sekolah, lokasi tempat tinggal, jarak rumah ke sekolah, kapasitas sekolah, serta kecenderungan pilihan orang tua dapat digunakan untuk memperkuat analisis mengenai penyebab ketimpangan distribusi murid. Pendekatan campuran juga dapat diterapkan untuk mengukur seberapa besar pengaruh jarak sekolah, reputasi, fasilitas, mutu layanan, dan karakteristik keluarga terhadap keputusan orang tua dalam memilih sekolah. Kajian yang membandingkan Kota Tanjungpinang dengan daerah lain juga dapat memperluas pemahaman mengenai hubungan antara kondisi demografis, preferensi masyarakat, dan efektivitas SPMB dalam mendukung pemerataan akses pendidikan.

References

- Akin, M. A., Rahman, U., & O. S. (2026). Teknik pemilihan informan dalam penelitian kualitatif: Strategi dan implementasi. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Ananda, R. (2025). Kebijakan dan permasalahan akses pendidikan dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10, 451.

- Ariska Putri, D. A. (2024). Pengaruh disparitas pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Parahyangan Economic Development Review*, 2(1), 29–46.
- Aristawidya, A. E., & Santoso Agus, R. (2025). Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, 6(6), 6.
- Aulia Rahmi, M., Ilha, M., & J., S. (2025). Dampak kebijakan zonasi terhadap ketimpangan akses pendidikan dasar di Indonesia pada era digital, 10(14), 6.
- Bida, O. (2021). Kebijakan desentralisasi dan disparitas pendidikan lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara, 9(1), 50–56.
- Cudai, A., & Guntur. (2019). Buku analisis kebijakan publik. *Analisis Kebijakan Publik*, 1(1), 147.
- Darya, I. G. P. (2020). Evaluasi implementasi sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Balikpapan, Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 20(1), 32–41.
- Dunn, W. N. (1998). Pengantar analisis kebijakan publik. Gajah Mada University Press.
- Handyka, M. A. (2023). Transformasi pendidikan: Strategi inovatif dalam peningkatan partisipasi sosial untuk membangun masyarakat yang inklusif dan berdaya saing. *JECTH: Journal Economy, Technology, Social and Humanities*, 1(1), 3–5.
- Hansen, S. (2020). Investigasi teknik wawancara dalam penelitian kualitatif manajemen konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 27(3), 283. <https://doi.org/10.5614/jts.2020.27.3.10>
- Harianti, L. N. S., & Sukma, L. N. (2024). Analisis kebijakan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan di SMAN 1 dan 2 Kota Blitar. *Foundasia*, 15(2), 27–37.
- Indiahono, D. (2009). Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis. Gava Media.
- Jones, C. O. (1996). Pengantar kebijakan publik (Public policy). Raja Grafindo Persada.
- Kepri, H. (2023). Penutupan sekolah dasar di Kota Tanjungpinang tahun 2023, 1(1), 1–3.
- Kurniawati, F. N. A. (2022). Meninjau permasalahan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dan solusi. *Academy of Education Journal*, 13(1), 3–5.
- Kusumanegara, S. (2010). Model dan aktor dalam kebijakan publik. Gava Media.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: An methods source book* (3rd ed.). SAGE Publication.
- Minsih, A. G. D. (2021). Persepsi masyarakat dan dampak sistem zonasi untuk jenjang sekolah dasar di Kecamatan Serengan Kota Surakarta. *Profesi Pendidikan Dasar*, 5(1), 20–27.
- Mubin, F., & Dian. (2023). Urgensi otonomi pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 71–79.
- Nila Rahmi, R. F. (2022). Implementasi perencanaan strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar, 1, 4–5.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- Patton, M. Q. (1987). *Qualitative evaluation methods*. Sage Publications.
- Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang. (n.d.). Petunjuk teknis Sistem Penerimaan Murid Baru jenjang taman kanak-kanak, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah pertama Kota Tanjungpinang tahun ajaran 2025/2026.

Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.

- Risna, & Lisdahlia. (2020). Analisis implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan. *Mappesona*, 2(1), 20.
- Ruhansih, D. S. (2017). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>
- Sabrina, D., & Ishak. (2020). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam seleksi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat sekolah menengah atas di Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 92–103. <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7829>
- Sinaga, R. W. N. C. A. (2025). Kajian teoritis: Analisis data kualitatif. *Jurnal Edukatif*, 3(1), 36–45.
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian pro kontra penerapan sistem zonasi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 115–130. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan Marindu. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 200.
- Winarti, N., Rahmi, K., & Charin, R. O. P. (2023). Harapan pemerataan menghadirkan kesenjangan: Analisis dampak kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2), 210–225.
- Zilfa, R. (2016). Desentralisasi pendidikan: Pengelolaan pendidikan dasar oleh pemerintah daerah. *JOIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(1).